

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembangunan di sebuah negara dapat dikatakan berhasil apabila mampu mengatasi berbagai permasalahan yang menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan, mencakup berbagai kehidupan masyarakat. Hakikat pembangunan sendiri adalah upaya manusia untuk secara sadar mengubah kondisi keseimbangan dari tingkat kualitas yang kurang baik menuju keseimbangan baru dengan kualitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, tujuan utama dari pembangunan adalah mewujudkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang yang menjadikan hal tersebut sebagai fokus utama (Lestari dkk. 2021).

Menurut Ratnasari, Lia (2017) Tujuan utama dari pembangunan adalah mewujudkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua hal tersebut dapat tercapai apabila pembangunan dilakukan secara merata di seluruh wilayah. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi antar daerah. Ketimpangan pembangunan ekonomi yang tinggi antar wilayah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Dari sisi ekonomi, ketimpangan tersebut menyebabkan pemanfaatan sumber daya menjadi kurang efisien dan memicu ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. Ketidakseimbangan pendapatan inilah yang kemudian dikenal sebagai ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi ketika terdapat perbedaan tingkat pendapatan di antara kelompok masyarakat, di mana sebagian masyarakat memiliki penghasilan tinggi sementara sebagian lainnya berpenghasilan rendah. Perbedaan tersebut menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara karena mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara penduduknya. Tingkat ketimpangan dapat diamati melalui sejauh mana perbedaan pendapatan terjadi antar kelompok masyarakat. Berdasarkan laporan Bank Dunia tahun 2015, tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2000. Kondisi ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan lebih banyak dinikmati oleh sekitar 20 persen kelompok berpendapatan tinggi (Oksamulya dan Anis 2020).

Menurut Andiny dan Mandasari (2017) Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan fenomena yang umum terjadi dalam aktivitas ekonomi di suatu daerah. Ketimpangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh perbedaan potensi sumber daya alam serta kondisi demografis di masing-masing wilayah. Perbedaan tersebut menyebabkan kemampuan setiap daerah dalam mendorong proses pembangunan menjadi tidak sama. Oleh sebab itu, hal ini menjelaskan mengapa dalam satu daerah sering ditemukan adanya wilayah yang telah berkembang (*developed region*) dan wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan (*underdeveloped region*).

Ketimpangan dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dari sisi positif, ketimpangan berpotensi mendorong wilayah yang tertinggal untuk

berkompetisi dan mempercepat proses pembangunan demi mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Namun demikian, ketimpangan juga membawa sejumlah dampak negatif, seperti menurunnya efisiensi ekonomi, melemahnya kohesi serta solidaritas sosial, dan munculnya ketidakadilan akibat kesenjangan yang terlalu besar. Dampak negatif tersebut menjadikan upaya pembangunan kesejahteraan sosial sebagai hal yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ketimpangan tidak selalu terjadi di wilayah perkotaan besar. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti, yang sebagian besar wilayahnya bersifat non perkotaan, justru menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat pendapatan antar wilayah di dalam provinsi tersebut. Fenomena ini menjadi menarik karena D.I. Yogyakarta dikenal memiliki kualitas sumber daya manusia yang relatif tinggi serta berperan sebagai pusat pendidikan nasional. Namun demikian, pencapaian tersebut belum mampu mewujudkan pemerataan ekonomi secara menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakatnya.

Perbedaan tingkat kondisi ekonomi antarwilayah di D.I Yogyakarta dapat dilihat dari ketimpangan pendapatan dan aktivitas ekonomi. Kota Yogyakarta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi karena memiliki infrastruktur yang lebih maju, akses pendidikan yang luas, serta konsentrasi lapangan kerja formal di sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan tinggi. Sebaliknya, wilayah seperti Gunungkidul, Kulon Progo, dan sebagian Bantul masih didominasi oleh sektor pertanian tradisional dan industri rumah tangga dengan produktivitas yang relatif

rendah. Kondisi ini menyebabkan pendapatan masyarakat di wilayah pedesaan jauh lebih kecil dibandingkan masyarakat perkotaan (BPS DIY dan Bappeda DIY 2020).

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan pola yang jelas antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kota Yogyakarta menempati posisi sebagai wilayah dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi. Kondisi ini tidak lepas dari perannya sebagai pusat aktivitas ekonomi terbesar di DIY. Berbagai sektor bernilai tambah tinggi seperti perdagangan modern, jasa pendidikan, perbankan, kesehatan, dan sektor wisata terkonsentrasi kuat di wilayah ini. Keberadaan universitas besar, pusat perbelanjaan, hotel berbintang, dan bisnis berbasis jasa menyebabkan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi lebih terfokus di wilayah kota. Di sisi lain, kelompok berpendapatan rendah yang tinggal di sekitar kota sulit mengejar kompetisi ekonomi karena tingginya biaya hidup serta keterbatasan akses terhadap lapangan kerja dengan standar kompetensi tinggi. Akibatnya, perbedaan pendapatan antarkelompok masyarakat semakin melebar, menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat ketimpangan tertinggi di provinsi tersebut.

Berbeda dengan Kota Yogyakarta yang menghadapi masalah ketimpangan akibat akumulasi pendapatan yang tinggi, wilayah-wilayah seperti Gunungkidul, Kulon Progo, dan sebagian Bantul mengalami ketimpangan dari sisi yang berlawanan, yakni rendahnya tingkat pendapatan dan terbatasnya aktivitas ekonomi produktif. Gunungkidul, misalnya, memiliki karakteristik geografis berupa kawasan karst yang kurang subur sehingga produktivitas pertanian relatif rendah. Sektor ekonomi masyarakat masih didominasi pertanian tradisional, peternakan

berskala kecil, dan industri rumah tangga. Lemahnya struktur ekonomi ini membuat pendapatan masyarakat di Gunungkidul jauh tertinggal dibandingkan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan. Kondisi serupa terjadi di Kulon Progo, yang meskipun mulai berkembang melalui proyek bandara YIA, sebagian besar wilayahnya masih bergantung pada sektor primer dengan nilai tambah ekonomi rendah. Sementara itu, wilayah Bantul bagian selatan memiliki pola ketimpangan yang mirip karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, atau pelaku usaha kecil skala mikro yang masih menghadapi kendala permodalan dan akses pasar (BPS DIY dan Bappeda DIY 2020).

Ketimpangan juga diperburuk oleh perbedaan akses pendidikan dan infrastruktur antarwilayah. Masyarakat kabupaten, terutama di pedesaan, masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan. Dalam konteks DIY, keberadaan perguruan tinggi yang banyak ternyata tidak otomatis menjamin pemerataan akses pendidikan. Sebagian besar institusi pendidikan berlokasi di Kota Yogyakarta dan Sleman, sehingga keuntungan peningkatan kualitas pendidikan lebih banyak dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Dampaknya, penduduk di wilayah kota cenderung memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi dan mampu mengakses pekerjaan dengan pendapatan yang lebih besar. Sementara itu, wilayah pedesaan mengalami keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, sehingga lingkaran ketimpangan semakin sulit diputus.

Ketimpangan antarwilayah di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh persebaran infrastruktur yang tidak merata. Wilayah kota dan sebagian Sleman menikmati

fasilitas transportasi, layanan kesehatan, akses pasar, dan jaringan ekonomi yang lebih mapan. Sebaliknya, sebagian wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo menghadapi keterbatasan jaringan transportasi modern, konektivitas ekonomi, dan fasilitas pendukung kegiatan usaha. Ketimpangan infrastruktur ini menyebabkan produktivitas wilayah pedesaan tetap rendah sehingga kesenjangan pendapatan antarwilayah terus terjadi.

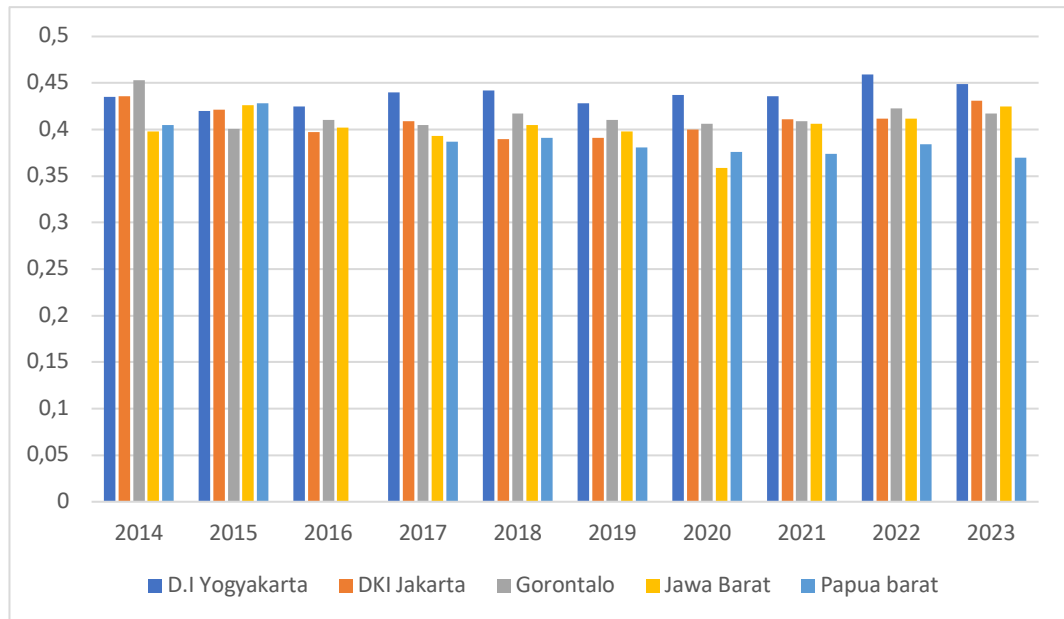
Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur ketimpangan pendapatan menggunakan Indeks Gini dengan skala 0–1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Penghitungan dilakukan berdasarkan distribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Menurut (Khoirudin dan Musta'in 2020), semakin besar nilai Gini Rasio menunjukkan semakin lebar jurang ekonomi di antara kelompok masyarakat. Dalam konteks D.I Yogyakarta, meskipun rata-rata tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi, hasil pembangunan dan peningkatan ekonomi belum terdistribusi secara merata.

Tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta yang diukur menggunakan Gini rasio menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Berdasarkan data, nilai Gini rasio tertinggi terdapat di wilayah Kota Yogyakarta, yang menandakan bahwa pemerataan pendapatan di daerah tersebut masih tergolong rendah.

Hal ini sejalan dengan kondisi nasional, di mana sejumlah provinsi lain di Indonesia juga mengalami tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi. Perbedaan struktur ekonomi dan konsentrasi kegiatan usaha di wilayah perkotaan

menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan tersebut. Beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi yang terpusat di sektor industri dan jasa cenderung memiliki jurang pendapatan yang lebih lebar dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian.

Gambar 1. 1. Gini Ratio Tertinggi di Indonesia



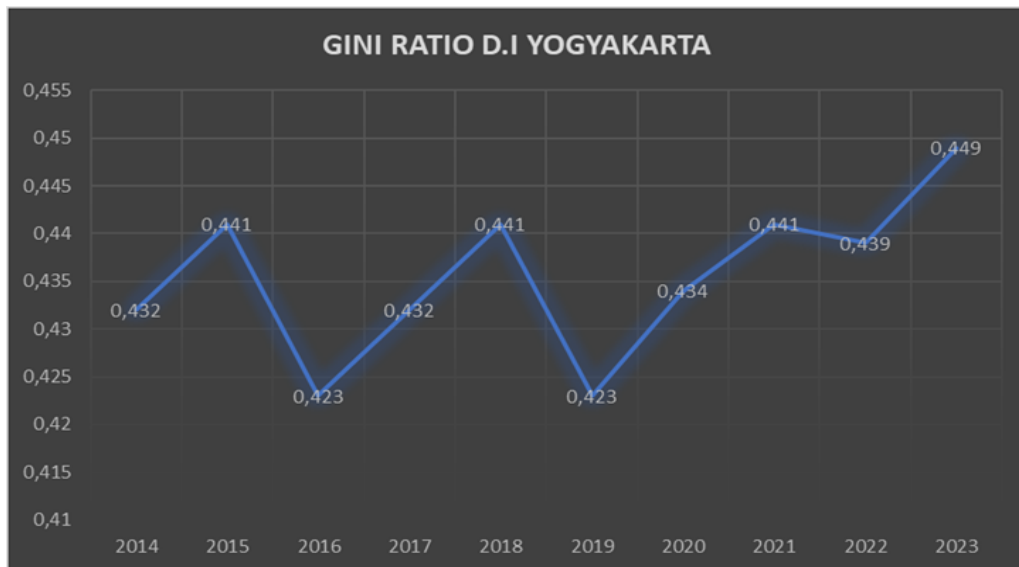
Sumber data: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Ketimpangan pendapatan, baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat, dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang signifikan. Salah satu di antaranya adalah munculnya rasa kecemburuan sosial antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Ketidakmerataan ini sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat, terutama ketika perbedaan pendapatan terjadi dalam wilayah yang sama dan dengan akses sumber daya yang serupa. Kondisi tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan menurunkan rasa solidaritas antarwarga.

Dalam konteks nilai-nilai dasar negara, fenomena ini juga mencerminkan bahwa cita-cita “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Adanya ketimpangan ekonomi yang masih tinggi menunjukkan bahwa hasil pembangunan belum mampu dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan langkah moral dan konstitusional dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Sukma 2021).

Tingkat Gini rasio antar wilayah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diukur menggunakan satuan indeks menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di provinsi tersebut berada pada kategori sedang. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai rata-rata Gini rasio terendah tercatat di wilayah Kota Yogyakarta. Tingkat ketimpangan yang berbeda di D.I. Yogyakarta disebabkan oleh variasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi serta perbedaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Selain itu, pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah-daerah yang telah lebih maju turut memperlebar kesenjangan antarwilayah. Ketimpangan yang terjadi berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan meningkatkan risiko terjadinya krisis finansial di tingkat regional. yang terjadi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan krisis finansial.

Gambar 1. 2 Gini Ratio di D.I Yogyakarta



Sumber data: BPS Yogyakarta, 2025 (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa presentase Gini rasio semakin meningkat. Terlihat dari data tersebut di tahun 2014-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Terbukti dalam data pada pada tahun 2014 yang awalnya 0,432 naik pada angka 0,441 di tahun 2015. Di tahun 2016 mengalami penurunan di angka 0,423. Pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan hingga 0,441. Dan kembali turun 0,423 di tahun 2019. Setelah tahun 2019 Gini rasio terus meningkat hingga 0,441 di tahun 2021. Di tahun selanjutnya mengalami penurunan 0,439 dan Kembali naik hingga di angka 0,449. Tingginya angka tersebut menjadi kategori ketimpangan tertinggi selama 10 tahun terakhir di tahun 2023.

Perbedaan pengeluaran penduduk kota dan desa di D.I Yogyakarta yang sangat tinggi membuat hal itu terjadi. Pada dasar data-data tersebut, maka fluktuasi pada Gini rasio di D.I. Yogyakarta periode 2014–2023 bisa dianggap menunjukkan suatu dinamika ketimpangan pendapatan yang cukup signifikan. Kenaikan serta penurunan angka Gini rasio tersebut dapat dijelaskan bahwa pola konsumsi

masyarakat perkotaan dan pedesaan memang selalu berbeda, dimana masyarakat dengan pendapatan tinggi akan memiliki tingkat daya beli yang lebih cepat daripada masyarakat dengan pendapatan rendah. Ketimpangan tersebut diperparah oleh kondisi konsentrasi ekonomi yang masih terpusat pada wilayah perkotaan, seperti Kota Yogyakarta, yang memiliki daya akses yang lebih baik pada sektor jasa, pariwisata, serta pendidikan, sementara daerah pedesaan masih mengandalkan sektor pertanian serta industri kecil yang pertumbuhannya cenderung lebih lambat.

Keberagaman sumber daya yang dimiliki setiap daerah menyebabkan pembangunan nasional seharusnya tidak dilaksanakan secara terpusat, melainkan berorientasi pada pengembangan regional yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Kebijakan yang terlalu tersentralisasi sering kali menimbulkan inefisiensi, karena banyak program pembangunan yang tidak relevan dengan kondisi daerah. Akibatnya, konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan pada pemerataan hasil pembangunan belum mampu secara signifikan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ketimpangan tersebut menimbulkan rasa ketidakadilan di beberapa daerah serta berdampak pada munculnya berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya pengangguran, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta menurunnya rasa aman dan kesejahteraan masyarakat (Khoirudin dan Musta'in 2020).

Ketimpangan pendapatan sering dikaitkan dengan berbagai faktor, salah satunya adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh pendidikan formal.

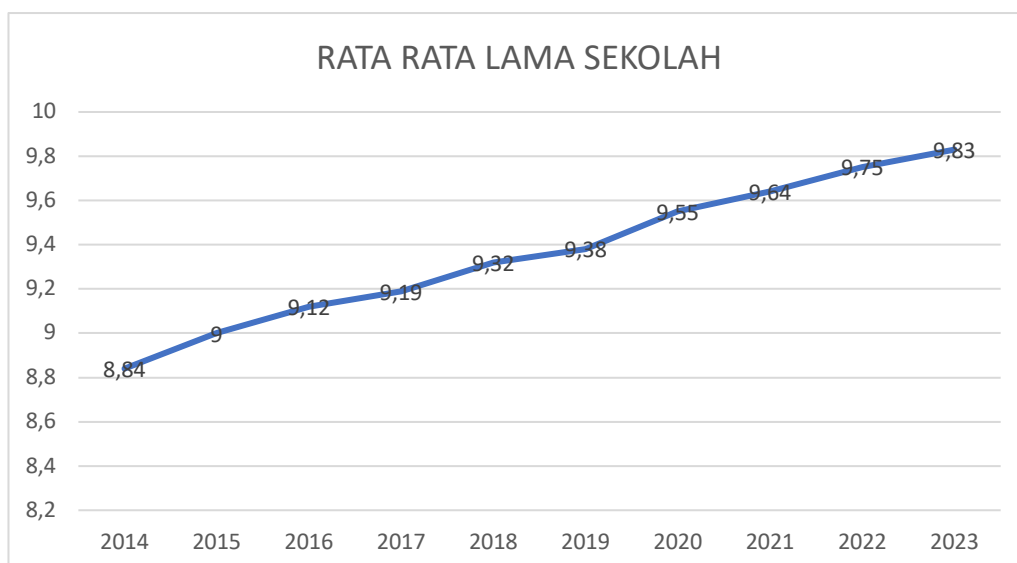
Indikator ini sering digunakan untuk menilai tingkat pendidikan masyarakat, karena mencerminkan durasi pendidikan yang telah diselesaikan oleh individu. Dalam penghitungan indeks pembangunan manusia, terdapat dua indikator utama di bidang pendidikan, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menunjukkan lama waktu pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak di suatu wilayah, sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan lama pendidikan yang secara nyata telah ditamatkan atau diselesaikan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.

Rata-rata lama sekolah memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta. Secara umum, peningkatan rata-rata lama sekolah diharapkan dapat memperbaiki kualitas sumber daya manusia sehingga mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih tinggi. Namun, di D.I Yogyakarta, meskipun rata-rata lama sekolah cukup tinggi, hal ini belum cukup untuk menjamin pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat.

Distribusi akses pendidikan yang tidak merata juga memperburuk ketimpangan pendapatan. Meskipun D.I Yogyakarta memiliki banyak institusi pendidikan berkualitas, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tinggi. Kelompok ekonomi menengah ke bawah sering kali menghadapi hambatan finansial dalam mengakses pendidikan tinggi, yang mengakibatkan mereka cenderung berada dalam pekerjaan dengan pendapatan yang lebih rendah. Dan juga faktor dari wilayah Yogyakarta yang pesebaran akses pendidikan kota dan pedesaan yang kurang merata.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lembaga pendidikan belum sepenuhnya diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar di seluruh wilayah. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan memiliki akses yang lebih mudah terhadap sarana pendidikan, pelatihan, dan fasilitas pendukung lainnya dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di wilayah kota cenderung lebih tinggi, sementara di pedesaan masih tertinggal. Kondisi ini berdampak langsung terhadap produktivitas tenaga kerja dan pada akhirnya memperlebar kesenjangan pendapatan antarwilayah di D.I. Yogyakarta.

Gambar 1. 3 Rata-Rata Lama Sekolah D.I Yogyakarta



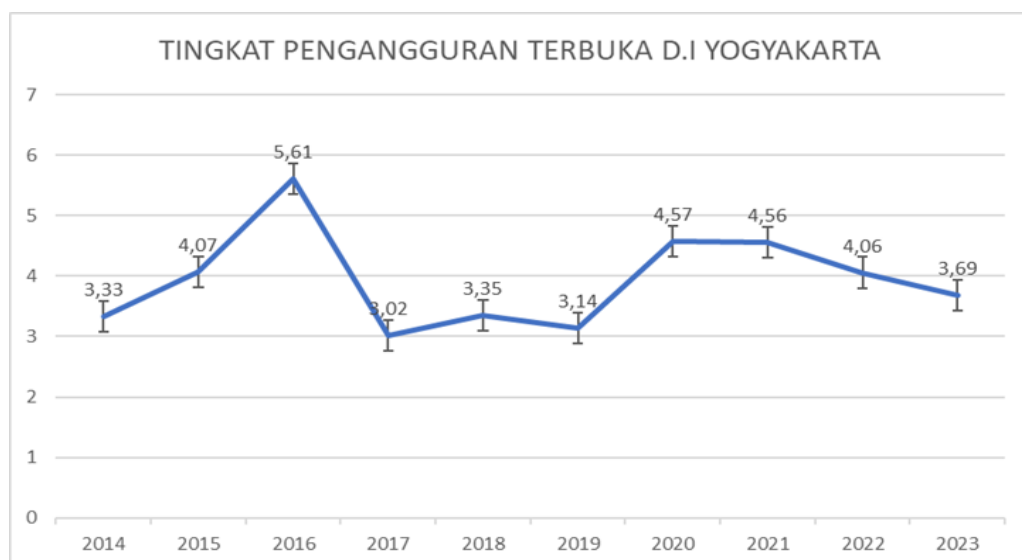
Sumber data: BPS Yogyakarta, 2025 (Data Diolah)

Dalam hasil grafik persebaran pendidikan di D.I. Yogyakarta masih belum merata hal itu terlihat dari daerah kota Yogyakarta yang memiliki presentase 11,57 persen, sedangkan di pedesaan seperti Gunung Kidul memiliki rata rata lama sekolah 6,98. Hal itu membuat pesebaran pendidikan di Yogyakarta kurang merata.

Akses untuk pendidikan di kota dengan pedesaan berbeda sehingga masyarakat kota lebih unggul daripada di pedesaan.

Selain pendidikan, salah satu faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta ialah tingkat pengangguran terbuka. Tingginya tingkat pengangguran memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat tercermin dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, maka tingkat kesejahteraan akan meningkat, dan hal tersebut mendorong terciptanya pemerataan pendapatan. Sebaliknya, tingginya angka pengangguran dapat menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi, karena individu yang tidak bekerja menjadi beban bagi keluarganya dan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi secara produktif terhadap kegiatan ekonomi.

Gambar 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka D.I Yogyakarta



Sumber data: BPS Yogyakarta, 2025 (Data Diolah)

Selama periode 2014 hingga 2023, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tingkat pengangguran terbukanya mengalami fluktuasi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Peningkatan tingkat pengangguran yang paling signifikan terjadi pada masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019, ketika terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja dan penurunan aktivitas ekonomi akibat kebijakan pembatasan sosial. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya produktivitas dan terganggunya kegiatan dunia usaha karena guncangan ekonomi global yang meluas.

Selanjutnya, faktor penting yang mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan ialah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan peningkatan kapasitas produksi, ekspansi kegiatan ekonomi, dan peningkatan pendapatan masyarakat secara umum. Jika pertumbuhan ekonomi berlangsung secara inklusif, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpendapatan rendah, melalui peningkatan kesempatan kerja dan daya beli. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi berperan strategis dalam mengurangi dan mempercepat proses pengentasan ketimpangan pendapatan.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi D.I Yogyakarta

D.I Yogyakarta	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
D.I Yogyakarta	5,17	4,95	5,05	5,26	6,2	6,59	-2,67	5,58	5,15	5,07

Sumber data: BPS Yogyakarta, 2025 (Data Diolah)

Dalam data diatas terlihat jelas bahwa pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta mengalami naik turun. Terlihat Tingkat tertinggi presentase dari laju pertumbuhan

ekonomi di Yogyakarta paling tinggi pada tahun 2019. Tetapi, pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup parah hingga menyentuh angka - 2,67%. Pada tahun itu mengalami penurunan akibat virus COVID-19. Dan naik kembali pada tahun berikutnya. Kemungkinan hal itu terjadi karena sektor unggulan dari kota Yogyakarta yang mempunyai sektor unggulan yaitu pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung turut memengaruhi keadaan perekonomian di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mencerminkan adanya peningkatan produktivitas dalam sektor barang maupun jasa. Produktivitas yang tinggi akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia. Pandemi tersebut memberikan pengaruh langsung terhadap perekonomian nasional, terutama melalui meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja, menurunnya produktivitas, serta melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara umum. Namun, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan secara bertahap seiring dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Pemulihan kondisi ekonomi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 secara cepat dan tepat. Seiring dengan menurunnya jumlah kasus positif, aktivitas

ekonomi masyarakat mulai kembali pulih, sehingga mendorong peningkatan produktivitas di berbagai sektor. Namun demikian, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi sempat berdampak pada menurunnya permintaan terhadap tenaga kerja. Kondisi ini menyebabkan peningkatan angka pengangguran, yang pada akhirnya turut memengaruhi kestabilan perekonomian secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai ketimpangan pendapatan dengan menggunakan variabel independen rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat regional, serta menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka untuk mengetahui pengaruhnya terhadap ketimpangan pendapatan dapat di ketahui beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah di sebutkan maka dapat dilihat tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap tingkat Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini berjenis time series selama 10 tahun dengan rentang waktu sejak 2014 hingga tahun 2023.
2. Dengan variabel penelitian yang digunakan mencakup variabel bebas yang terdiri dari Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi. Serta Gini Ratio sebagai variabel terikat.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini jika di sesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian :

1. Bagi Akademi

Penelitian ini bisa memberi manfaat pada pengembangan teori-teori soal ketimpangan pendapatan, terutama di area regional seperti D.I. Yogyakarta. Dengan mempelajari aspek-aspek seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini bisa menambah pemahaman tentang cara aspek-aspek ini saling berhubungan dan mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sebuah informasi dan acuan untuk mengetahui analisis pengaruh rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di D.I. Yogyakarta.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ekonomi Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.